

Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MAP. MH.



# **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK** (Konsep dan Model)



# EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (KONSEP DAN MODEL)

Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MAP. MH.



## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (KONSEP DAN MODEL)

Penulis:  
Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MAP. MH.

Desain Cover:  
Tahta Media

Editor:  
Tahta Media

Proofreader:  
Tahta Media

Ukuran:  
vi,110, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-364-6

Cetakan Pertama:  
April 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Tahta Media Group**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP**  
**(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)**  
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada TYME yang telah menyertai serta memberikan hikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini .Buku Evaluasi Kebijakan Publik ini terdiri dari 6 BAB dan dilengkapi dengan berbagai macam model-model evaluasi yang ada. Sebagai buku pedoman, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun perumus dan pelaksana kebijakan agar dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menentukan model yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan di masa yang akan datang.Melalui kesempatan ini tim penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini.

Tim penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, buku ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga tim penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Tondano, April 2024

Penulis

Margareth I. R. Rantung.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Konsep Kebijakan Publik.....	1
1.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	6
1.3 Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	15
BAB II TUJUAN, SIFAT, DAN FUNGSI EVALUASI.....	19
2.1 Tujuan Evaluasi .....	19
2.2 Sifat-Sifat Evaluasi.....	20
2.3 Fungsi-fungsi Evaluasi Kebijakan .....	21
BAB III TIPE DAN LANGKAH EVALUASI KEBIJAKAN .....	24
3.1 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan.....	24
3.2 Langkah-langkah Evaluasi .....	25
BAB IV MODEL-MODEL EVALUASI KEBIJAKAN.....	27
4.1 Model Evaluasi Menurut Lester dan Steward .....	27
4.2 Model Evaluasi Menurut Ernest R. House .....	30
4.3 Model Evaluasi Menurut Anderson .....	40
4.4 Model Evaluasi Menurut Thomas Cook dan Frank Scioli .....	41
4.5 Model Evaluasi Menurut William Dunn .....	42
4.6 Model Evaluasi Menurut Michael Scriven.....	48
4.7 Model Evaluasi Menurut Robert Stake.....	53
4.8 Model Evaluasi Menurut Daniel Stufflebeam .....	56
4.9 Model Evaluasi Menurut Robert L. Wolf dan T. R. Owen .....	59
4.10 Model Evaluasi Menurut Malcolm M. Provus .....	61
4.11 Model Evaluasi Menurut Elliot W. Eisner .....	63

4.12	Model Evaluasi Menurut Michael Quinn Patton.....	68
4.13	Model Evaluasi Menurut Petter Rossi, Huey Tsyh Chen, C. Weiss dan Steward Donaldson .....	69
4.14	Model Evaluasi menurut James P. Lester dan Joseph Steward.....	79
4.15	Model Evaluasi Menurut Howlett dan Ramesh.....	92
4.16	Model Evaluasi Menurut Carol. H Weiss.....	95
4.17	Model Evaluasi Menurut Wirawan.....	97
<b>BAB V PARAMETER dan PERUBAHAN &amp; TERMINASI KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>		<b>100</b>
5.1	Parameter Evaluasi Kebijakan.....	100
5.2	Perubahan dan Terminasi Evaluasi Kebijakan.....	101
<b>BAB VI MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>		<b>105</b>
6.1	Masalah Kebijakan Publik.....	105
6.2	Contoh Masalah Kebijakan Publik .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn... ..	43
Tabel 4.2 Pendekatan-pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn... ..	45
Tabel 4.3 Variasi Evaluasi Formal... ..	84
Tabel 4.4 Perbandingan Pendekatan Dalam Evaluasi... ..	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Kebijakan Publik .....	14
Gambar 4.1 Alur Terjadinya Evaluasi Formatif dan Sumatif .....	52
Gambar 4.2 Proses Evaluasi Model DSM .....	62
Gambar 4.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

#### 1.1.1 Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam Bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara

berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **1.1.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*” atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai “*a projected program of goal, value, and practice*” atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Wildavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain

misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus- menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat

hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the authoritative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### **1.1.3 Urgensi Kebijakan Publik**

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: “Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16- 19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978)

menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

## 1.2 TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam proses penyusunan kebijakan publik, memerlukan sebuah tahapan yang kompleks karena menggunakan banyak sekali variabel untuk mendukung kebijakan yang akan ditentukan, maka dari itu banyak para ahli yang berkecimpung dalam dunia kebijakan melakukan sebuah kajian untuk menentukan cara tepat dalam melakukan proses kebijakan.

Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai tahapan dalam penyusunan kebijakan publik :

- **James Anderson**

- Formulasi Masalah, tahap awal dalam siklus kebijakan di mana suatu masalah diidentifikasi dan dirumuskan dengan cermat. Ini

melibatkan analisis mendalam tentang sumber, dampak, dan akar penyebab masalah yang ingin diatasi.

- Formulasi Kebijakan, setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan untuk mengatasi atau mengelolanya. Formulasi kebijakan melibatkan pembuatan rencana atau proposal konkret yang menguraikan langkah- langkah yang akan diambil.
  - Penentuan Kebijakan, pada tahap ini, kebijakan yang diformulasikan dievaluasi dan dipilih untuk diadopsi. Proses ini melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, diskusi publik, dan pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan atau lembaga yang berwenang.
  - Implementasi Kebijakan, setelah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini melibatkan alokasi sumber daya, perencanaan operasional, dan eksekusi langkah-langkah yang dijelaskan dalam kebijakan. Monitoring dan pengendalian dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif.
  - Evaluasi Kebijakan, tahap evaluasi melibatkan penilaian kinerja kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi dapat mencakup dampak kebijakan, efektivitas dalam mencapai tujuan, dan dampaknya pada masyarakat atau lingkungan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan selanjutnya atau perubahan yang diperlukan
- **Harold D. Lasswell (1956)**
    - Intelegensi (Intelligence), mengumpulkan dan memproses berbagai pendapat dari proses pembuatan kebijakan
    - Promosi (Promotion), memilih beberapa pilihan yang ada
    - Preskripsi (Prescription), menentukan aksi
    - Permohonan (Invocation), rujukan ke kebijakan yang lebih tinggi atau persetujuan adanya sanksi-sanksi
    - Aplikasi (Application) atau pelaksanaan
    - Terminasi (Termination) atau penghentian
    - Evaluasi (Appraisal), penilaian atau evaluasi

- **R. Mack (1971)**

- Memutuskan untuk Menetapkan (Pengenalan Masalah): Tahap awal di mana suatu masalah atau isu diidentifikasi dan diakui sebagai suatu kebutuhan untuk tindakan. Pada tahap ini, fokus pada pemahaman mendalam terhadap sumber masalah dan urgensi untuk menetapkan kebijakan.
- Merumuskan Alternatif dan Kriteria Pemilihan: Proses merinci berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menanggapi masalah yang diidentifikasi. Pada tahap ini, kriteria pemilihan juga ditentukan untuk membantu evaluasi kebijakan yang diusulkan.
- Menentukan Keputusan yang Terbaik: Evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang dianggap paling efektif atau sesuai untuk menangani masalah.
- Melahirkan Akibat Kebijakan (Effectuation): Implementasi kebijakan yang telah dipilih dan melihat dampak atau hasil dari tindakan tersebut. Proses ini melibatkan menjalankan kebijakan ke dalam tindakan nyata dan melihat bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi situasi atau masalah yang ingin diatasi.
- Koreksi dan Penambahan (Supplementation): Tahap dinamis di mana kebijakan dinilai secara terus-menerus dan dapat mengalami penyesuaian, perubahan, atau penambahan. Ini bisa termasuk koreksi jika ada ketidakcocokan antara hasil yang diinginkan dan yang dicapai atau penambahan elemen baru berdasarkan evaluasi berkelanjutan.

- **R. Rose**

- Pengakuan Publik akan Perlunya Sebuah Kebijakan (Isu): Awal dari siklus kebijakan, di mana masalah diakui dan mendapatkan perhatian publik sebagai suatu kebutuhan untuk tindakan. Pengakuan ini dapat muncul melalui peristiwa, penelitian, atau tuntutan masyarakat.
- Isu Masuk Agenda Kontroversi Publik: Proses di mana masalah menjadi pusat perhatian dan kontroversi dalam ruang publik. Hal

ini bisa melibatkan berbagai pihak dengan pandangan dan kepentingan yang berbeda terhadap isu tersebut.

- Masuk/Diajukannya Tuntutan/Permintaan: Munculnya tuntutan atau permintaan dari masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan tanggapan atau tindakan dari pemerintah.
  - Terlibatnya Pemerintah: Pemerintah mulai terlibat dalam merespons isu yang diakui. Ini dapat melibatkan departemen atau lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab terkait dengan isu tersebut.
  - Dikerahkannya Sumber Daya dan Disingkirkannya (Diciptakan) Rintangan: Pemerintah menetapkan sumber daya dan menciptakan kebijakan untuk mengatasi isu tersebut. Rintangan yang mungkin muncul juga diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif.
  - Keputusan Kebijakan (Policy Decisions): Pada tahap ini, kebijakan yang akan diambil untuk menanggapi isu telah diputuskan. Ini melibatkan evaluasi berbagai opsi dan pemilihan solusi yang paling sesuai.
  - Implementasi: Langkah di mana kebijakan dijalankan ke dalam tindakan nyata. Sumber daya dialokasikan, proses diorganisir, dan kebijakan diimplementasikan sesuai dengan rencana.
  - Output: Hasil konkrit dari implementasi kebijakan. Ini bisa mencakup program, layanan, atau perubahan konkret dalam masyarakat.
  - Evaluasi: Proses penilaian kinerja kebijakan setelah implementasi. Evaluasi ini melibatkan penilaian dampak, efektivitas, dan kepatuhan terhadap tujuan kebijakan.
  - Umpan Balik (Feedback): Menerima umpan balik dari berbagai pihak terkait kinerja kebijakan. Informasi ini dapat digunakan untuk penyesuaian, perbaikan, atau perubahan kebijakan di masa depan.
- W. Jenkins (1976)
    - Inisiasi, Tahap awal di mana masalah atau isu muncul dan

mendapatkan perhatian. Ini dapat melibatkan pihak-pihak yang tertarik atau kelompok masyarakat yang merasa perlu untuk mengatasi suatu masalah.

- Informasi, Pengumpulan dan analisis data untuk memahami masalah dengan lebih baik. Informasi ini mencakup data empiris, pandangan berbagai pihak, dan analisis kebijakan yang relevan.
  - Pertimbangan, Proses penilaian dan pembahasan berbagai opsi kebijakan yang mungkin. Pertimbangan melibatkan analisis kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi serta implikasi potensialnya.
  - Keputusan, Tahap di mana keputusan dibuat berdasarkan informasi dan pertimbangan yang telah dikumpulkan. Keputusan dapat diambil oleh pembuat kebijakan atau lembaga yang berwenang.
  - Implementasi, Proses menerapkan kebijakan yang telah diambil ke dalam tindakan nyata. Ini melibatkan alokasi sumber daya, perencanaan operasional, dan pengorganisasian untuk menjalankan kebijakan.
  - Evaluasi, Penilaian dampak dan efektivitas kebijakan setelah diimplementasikan
  - Evaluasi dapat mencakup pertanyaan apakah kebijakan mencapai tujuannya, sejauh mana kebijakan tersebut berhasil, dan apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan.
  - Terminasi (Penghentian): Tahap di mana kebijakan dihentikan atau diperbaharui. Ini dapat terjadi jika kebijakan tidak memberikan hasil yang diharapkan, atau jika ada perubahan dalam kondisi atau prioritas yang mengharuskan adaptasi atau penghentian kebijakan.
- BW. Hogwood dan L.A. Gunn (1984)
    - Memutuskan untuk memutuskan, Mengidentifikasi masalah atau isu yang perlu diatasi dan menentukan agenda untuk pengambilan keputusan
    - Memutuskan cara bagaimana memutuskan, Proses penentuan metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Ini mungkin mencakup pemilihan tim, metode analisis,

dan sumber daya yang akan digunakan.

- Mendefinisikan Isu, Tahap di mana isu atau masalah yang diidentifikasi lebih jelas didefinisikan dan dipahami. Ini dapat melibatkan analisis mendalam untuk memahami akar penyebab dan implikasi isu tersebut.
  - Meramalkan, Memperkirakan, dan Forecasting, Proses memperkirakan hasil atau dampak dari berbagai keputusan yang mungkin diambil. Ini dapat melibatkan analisis data historis, tren, atau peramalan masa depan.
  - Menentukan Tujuan dan Prioritas, Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menetapkan prioritas untuk mencapai tujuan
  - Analisis Opsi, Evaluasi berbagai opsi atau alternatif yang mungkin untuk mengatasi isu atau mencapai tujuan. Ini melibatkan pertimbangan kelebihan, kekurangan, dan risiko dari setiap opsi.
  - Implementasi Kebijakan, Monitoring, dan Control, Tahap pelaksanaan keputusan yang diambil. Selain itu, proses pemantauan dan pengendalian diterapkan untuk memastikan implementasi yang efektif.
  - Evaluasi dan Review, Penilaian kembali hasil dan dampak dari keputusan yang diambil. Ini membantu dalam memahami keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan memberikan peluang untuk pembelajaran.
  - Pemeliharaan Kebijakan, Penggantian, dan Penghentian, yakni tahap terakhir yang melibatkan pemeliharaan kebijakan yang ada, pertimbangan untuk menggantinya jika diperlukan, atau bahkan menghentikan kebijakan yang tidak efektif.
- William N. Dunn
    - Penyusunan agenda, adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari

pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William N. Dunn (2003), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

- Formulasi Kebijakan, Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
- Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.
- Implementasi Kebijakan, Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
- Evaluasi Kebijakan/Penilaian, Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, Program - program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dari pendapat para ahli diatas mengenai tahapan kebijakan publik, dapat diambil garis besarnya :

A. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu yang ditunda untuk waktu yang lama.

B. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang tidak masuk kedalam agenda kebijakan kemudian ditulis oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang tadi didefinisikan kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor dapat bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

C. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumusan kebijakan. Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau putusan

peradilan.

D. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan apabila dalam prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut tiadalah berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing.

E. Tahap Evaluasi atau Penilaian kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti apa dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan. Dalam prosesnya sebuah kebijakan publik memiliki sebuah tahapan yang saling terkait satu sama lainnya. Sehingga apabila tahapan tersebut hilang salah satunya. Maka tentunya akan mempengaruhi kebijakan publik itu sendiri.

**Tahapan Kebijakan Publik**



Gambar 1.1 Tahapan Kebijakan Publik  
(Sumber: Analisis Penulis, 2023)

### **1.3 PENGERTIAN EVALUASI KEBIJAKAN**

Evaluasi umumnya dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan serta mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), evaluasi kebijakan dapat dianggap sebagai kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian kebijakan, termasuk aspek substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaannya.

Menurut Taliziduhu (Ndraha, 1989:201). Ndraha dalam buku Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Menurut Cook dan Schioli, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

(Mustopadidjaja, 2002:45) Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu.

(Muhajir,1996) Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

(Subarsono, 2005) Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya. (Francis G. Caro, 1971:2) Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu

dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri

Sudarwan Danim, (Danim, 2000:14) mengemukakan definisi penilaian (evaluating) adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penelitian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”.

Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) membedakan evaluasi kebijakan menjadi dua tugas berbeda. Tugas pertama adalah menggambarkan konsekuensi yang timbul dari suatu kebijakan dengan mengidentifikasi dampaknya. Sementara tugas kedua adalah menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan melibatkan pengukuran dan penilaian fakta terkait tahap implementasi kebijakan dan hasil (outcome) atau dampak (impact) dari suatu kebijakan atau program tertentu. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

Evaluasi memegang peran kunci dalam analisis kebijakan, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, evaluasi menyediakan informasi yang sah dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan, seperti sejauh mana kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah tercapai melalui tindakan publik. Evaluasi secara khusus mengungkapkan pencapaian tujuan dan target tertentu.

Kedua, evaluasi memberikan kontribusi dalam mengklasifikasi dan mengkritik nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai tersebut diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target, namun juga dikritik dengan pertanyaan sistematis tentang kelayakan tujuan dan target dalam konteks masalah yang dihadapi.

Ketiga, evaluasi memberikan kontribusi pada penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang kinerja kebijakan yang kurang memadai dapat membantu merumuskan ulang masalah kebijakan atau mengidentifikasi alternatif kebijakan yang baru.

Menurut Bardach (2008), evaluasi memiliki dua aspek yang saling terkait, yaitu menggunakan berbagai metode untuk memonitor hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi, serta menilai kegunaan hasil ini terhadap berbagai pihak. Meskipun aspek ini saling berhubungan, perlu dicatat bahwa evaluasi melibatkan fakta dan premis-premis nilai dalam setiap tuntutan evaluatif. Banyak aktivitas yang disebut sebagai "evaluasi" dalam analisis kebijakan sebenarnya bersifat non-evaluatif, lebih fokus pada produksi tuntutan designative (faktual) daripada tuntutan evaluatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan seperti "penelitian evaluasi" atau "evaluasi kebijakan" (Bardach, 2008).

Secara umum, terdapat 4 (empat) karakteristik pokok dari kegiatan evaluasi, yakni:

1. Berfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi difokuskan pada nilai dari suatu kebijakan, atau penilaian atas keterpenuhan kepentingan atau manfaat dari keberadaan suatu program. Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar mengumpulkan informasi tentang apakah seluruh tindakan telah dilaksanakan, tidak juga sekedar mengenai hasil dari suatu kebijakan. Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup aspek ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan.
2. Interdependensi antara fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa sebuah kebijakan telah mencapai tujuan optimal bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan, kegiatan evaluasi membutuhkan fakta-fakta yang memadai yang menjelaskan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai benar-benar merupakan akibat dari dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh karenanya, kegiatan evaluasi harus berdasar pada hasil-hasil pemantauan.
3. Berorientasi pada masa kini dan masa lampau. Berbeda halnya dengan rekomendasi kebijakan atau peramalan yang berorientasi waktu masa depan, penilaian atas hasil kebijakan lebih diarahkan pada tuntutan-tuntutan masa kini dan masa lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi

bersifat retroaktif.

4. Bernilai ganda. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan evaluasi mempunyai kualitas ganda, di satu sisi ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan di sisi yang lain, dapat dipandang sebagai cara. Di samping itu, evaluasi dapat juga dipandang intrinsik, yakni keberadaannya diperlukan untuk tujuannya sendiri, dan sekaligus ekstrinsik, yakni pencapaian tujuannya mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan kegiatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dilapanga & Margareth Rantung. (2022). *Monitoring & Evaluasi Kebijakan Publik*, 46-77 Buse, K., & Mays, N. (2012). *Walt G. Making health policy*. McGraw-Hill Education (UK). Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Elly\_PSIA. (2010). "Microsoft Word - Lampiran 1 COVER." Diakses dari [ [10 BAB 2](#)
- TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Kebijakan Publik Dalam beberapa tahun belakangan ini, dimana persoalan-persoalan yang ], pada 15 Juni 2010
- Ernawan, Deandra R. 2021. Evaluasi pelaksanaan unbk kota malang. *Jurnal ilmiah administrasi publik*
- Francis G. Caro. 1971. *Issues in The Evaluation of Sosial Programs*. University of Colorado. Hamzehlou, Z., Yarmohammadian MH, & Keshtiaray, N. (2019). *Evaluasi Pengalaman Pendidik dari Kurikulum Seni di Universitas Farhangiyan Menurut Model Keahlian dan Kritik Eisner*. *Jurnal Kajian Eksplorasi Hukum dan Manajemen* , 6 (4), 202-215.
- Helda Kusuma Wardani. Fajarsih Darusuprapti. Mami Hajaroh. /E-ISSN: 2598-2877, P- ISSN:2598-5175/Vol 6 No 1, Januari 2022
- Kinarsky, AR, & Fujita-Conrads, E. (2023). *Sinopsis Teori Evaluasi. Akar Evaluasi: Teori yang Mempengaruhi Praktek*, 255.
- Leo, Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.
- Madaus, George F., Michael S. Scriven dan Daniel L. Stufflebeam.1991. *Evaluation Models Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation. Ninth Printing: USA*
- Ndraha, Taliziduhu. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Nordin, A., & Wahlström, N. (2019). *Wacana kebijakan transnasional tentang 'kualitas guru': Pendekatan keahlian dan kritik pendidikan. Masa Depan Kebijakan dalam Pendidikan*, 17 (3), 438-454.
- Patton, M. Q. (2008). *"Utilization-Focused Evaluation."* Sage Publications.  
Sumber: <https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20->

[%2007401241045.pdf](#)

- Patton, M. Q. (2010). *Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use*. Guilford Press.
- Ririn Mais, Daud Liando, Fanley Pangemanan. (2019). *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung: Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan*./volume 3 No. 3 Tahun 2019/ISSN: 2337-5735
- Stufflebeam, Daniel. 2007. *Evaluation : Theory, Model, Application*. San Francisco, CA : Whilley Tayibnapis, Farida Yusuf. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul. S. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.6 Wibawa, Samodra, dkk, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Widoyoko, Eko P. (2017). *Evaluasi program pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi, 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik, Edisi/Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Media Pressindo,
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, teori, proses dan studi kasus*. Jakarta : CAPS.PT. Buku Seru.
- Wirawan.2012. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajawali Press. Weiss, C.H. 1998. *Evaluation : Methods for Studying Programs and Policies*. Upper Sadle River, NJ :Prentice Hall

# EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Konsep dan Model)



CV. Tahta Media Group  
Surakarta, Jawa Tengah  
Web : [www.tahtamedia.com](http://www.tahtamedia.com)  
Ig : tahtamedigroup  
Telp/WA : +62 896-5427-3996

